
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP MODA TRANSPORTASI SPEED DAN KLOTOL PENAJAM - BALIKPAPAN

Andi Bachtiar Latief¹, Mulyadi Hamid², Sri Adrianti Muin³

¹Mahasiswa Magister Manajemen, Universitas Fajar

^{2,3}Dosen Magister Manajemen, Universitas Fajar

email: sriadriantim25@gmail.com

Abstract

The general objective of this research is to understand and analyze public policies regulating Speed Boat and Klotok transportation modes in Penajam – Balikpapan, as well as documenting specific steps taken by the local government to enhance the quality of maritime transportation services in the region. In this study, the author employs qualitative field research with a descriptive-analytical approach. The findings of the analysis of public policies on Speed Boat and Klotok transportation modes in Penajam– Balikpapan, based on the Regent's Regulation of Penajam Paser Utara No. 31 of 2017, highlight the central role of the Head of the Transportation Agency and inter-section coordination for policy coherence. The main focus includes evaluating task implementation and optimizing the performance of related sectors. Challenges involve regulations, operational permits, infrastructure, security, and the environment, requiring careful coordination, technological utilization, and future planning. Continuous monitoring is necessary to ensure inclusivity and sustainability of the socio-economic impacts of transportation modes. The local government of Penajam Paser Utara takes strategic steps by planning the revitalization of the dock, including improved physical design, land arrangement, and efficient access. These measures, including the integration of safety and security aspects, align with the commitment of the Transportation Agency and involve the participation of local communities and spatial changes, reflecting an inclusive policy that considers local needs and aspirations

Keywords: Public Policy, Transportation Modes, Speed Boat, Klotok.

Abstrak

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan publik yang mengatur moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan, serta mendokumentasikan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut di wilayah tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian Analisis kebijakan moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam– Balikpapan, berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2017, menyoroti peran sentral Kepala Dinas Perhubungan dan koordinasi antar-seksi untuk keterpaduan kebijakan. Fokus utama mencakup evaluasi pelaksanaan tugas dan optimalisasi kinerja sektor-sektor terkait. Tantangan melibatkan regulasi, izin operasional, infrastruktur, keamanan, dan lingkungan, memerlukan koordinasi, penggunaan teknologi, dan perencanaan masa depan yang cermat. Pemantauan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan dampak sosial-ekonomi moda transportasi. Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengambil langkah-langkah strategis dengan merencanakan revitalisasi dermaga, mencakup desain fisik yang ditingkatkan, penataan lahan, dan akses efisien. Langkah-langkah ini, termasuk integrasi aspek keamanan dan keselamatan, sejalan dengan komitmen Dinas Perhubungan, dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal serta perubahan tata ruang, mencerminkan kebijakan inklusif yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Moda Transportasi, Speed, Klotok.

Sekretariat

Editorial Office: Program Studi Manajemen Universitas Fajar –
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: pomajurnal@gmail.com

OJS: <https://journal.unifa.ac.id/index.php/POMAJURNAL/index>

PENDAHULUAN

Mobilitas pergerakan masyarakat di Penajam Paser Utara kian hari kian meningkat, seiring dengan terbentuknya Kota Nusantara yang menjadi IKN Baru di Indonesia. Nusantara adalah nama Ibu Kota Negara Baru Indonesia yang menjadi salah satu penggerak perekonomian masa depan Indonesia. Terletak di kawasan hutan tanaman industri dan masih belum banyak penduduk bermukim akan mempermudah penataan kota sejak awal. Penataan kota yang memberikan ruang hingga 75% untuk kawasan hijau akan membuat kota ini layak dihuni dan ramah lingkungan. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang akan menjadi pendukung pertumbuhan perekonomian di IKN. Kota yang telah memiliki infrastruktur transportasi yang memadai seperti Bandara dan transportasi laut tentunya akan menjadikan kedua kota ini sebagai pintu masuk menuju kota Nusantara. Pembangunan IKN yang sedang berlangsung tentunya akan menghadirkan banyak penduduk Indonesia yang akan mendatangi kawasan tersebut. Para pendatang ini merupakan para masyarakat lokal, pengusaha maupun para pejabat maupun tamu undangan yang memiliki berbagai kepentingan sendiri (Puteri, 2020).

Penajam Paser Utara, salah satu Kabupaten di Kaltim, yang direncanakan menjadi Calon Ibukota Negara baru yang memiliki akses dari Kota Balikpapan yang dapat ditempuh melalui dua pilihan jalur yang dapat ditempuh untuk menuju daerah ini dari Kota Balikpapan yaitu jalur darat dan laut. Jalur darat dapat ditempuh melalui KM 38 Jalur Trans Balikpapan – Samarinda dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam. Sedangkan untuk jalur laut dapat ditempuh melalui pelabuhan Balikpapan menggunakan Kapal Fery dengan waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Jika ingin lebih cepat, dapat menggunakan *speedboat* yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Dengan meningkatnya pergerakan dalam masyarakat yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi laut. Sehingga akan berdampak pula pada tumbuhnya kompetisi antar moda angkutan laut penumpang. Pemilihan moda dapat dikatakan sebagai tahap terpenting dalam perencanaan transportasi. Ini karena peran kunci dari angkutan laut dalam berbagai kebijakan transportasi. Berbagai alasan dan pertimbangan yang mendasari pelaku perjalanan dalam melakukan pemilihan moda transportasi rute Penajam - Balikpapan.

Melihat antusias masyarakat Indonesia yang ingin menuju IKN sehingga transportasi di sekitar IKN menunjukkan peningkatan penumpang. Speed boat dan kapal klotok merupakan transportasi favorit yang biasa digunakan oleh kebanyakan masyarakat. Kapal klotok adalah kapal yang terbuat dari kayu dan digerakan oleh mesin diesel besar. Kapal ini mampu membawa penumpang lebih dari 20 orang dan bisa juga mengangkut kendaraan roda dua. Lain halnya Speed boat yang hanya dapat membawa penumpang hingga 10 orang (Maslina dan Fauzan, 2016).

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri (PM) No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan dan PM No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut. Kedua PM tersebut merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pengguna moda transportasi. Tujuan, diterbitkannya kedua peraturan menteri tersebut bertujuan demi terselenggaranya transportasi laut. Standar pelayanan penumpang angkutan laut meliputi standar pelayanan angkutan laut di terminal dan standar pelayanan di atas kapal.

Standar pelayanan penumpang angkutan laut di atas kapal harus memenuhi persyaratan tersedianya informasi dan fasilitas keselamatan, informasi dan fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan dan ketertiban berupa sarana naik turun penumpang dari dan ke kapal, pos dan petugas keamanan, informasi gangguan keamanan serta peralatan dan pendukung keamanan. Sementara standar pelayanan penumpang angkutan laut di terminal harus memenuhi persyaratan adanya kemudahan untuk mendapatkan tiket, jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal, ruang tunggu, gate boarding, toilet, tempat ibadah, lampu penerangan, fasilitas pengatur suhu, fasilitas kebersihan, ruang pelayanan kesehatan, area merokok,

informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, pelayanan bagasi penumpang, fasilitas penyandang difabel, ruang ibu menyusui, informasi dan fasilitas keselamatan, informasi gangguan keamanan dan kafetaria (Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 20 tahun 2015, 2015).

Transportasi laut menjadi sangat dibutuhkan dan berperan sangat vital untuk melayani perpindahan logistik berupa barang, orang, dan uang sebagai salah satu fungsi alat transportasi. Namun demikian, dibalik peran penting transportasi laut, ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi moda transportasi laut, khususnya di penajam masih menghadapi berbagai permasalahan, Saat ini moda transportasi laut yang tersedia adalah speed boat, Berdasarkan fenomena real yang ada, yakni pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan umum adalah pelabuhan Speed dan klotok. Namun demikian kondisi pelabuhan klotok sangat memprihatinkan, baik dari sisi pelayanan maupun kondisi fisik bangunan yang jauh dari standar bagi kenyamanan dan keselamatan penumpang karena tidak dilengkapi dengan sarana penunjang yang layak.

Disamping itu yang menjadi permasalahan yang sangat penting yakni terkait alas hak dari klotok dan speed,, lahan yang digunakan masih merupakan milik pribadi, sehingga pengembangan untuk moda transportasi klotok dan speed penajam–Balikpapan, sehingga tidak ada pengembangan untuk prasana angkutan tersebut, Hal ini disebabkan karena kepemilikan dan kegiatan operasional pelabuhan dikuasai oleh perorangan, sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan prasarana angkutan speed dan klotok tersebut. Walaupun dengan fasilitas pendukung yang sangat minim, masyarakat masih menggunakan klotok sebagai sarana utama untuk menyeberang ke Balikpapan atau sebaliknya. Hal ini disebabkan karena angkutan klotok lebih murah, waktu tempuh yang tidak terlalu lama ($\pm 30 - 60$ menit), lebih cepat dibandingkan dengan Kapal Fery penyeberangan dengan waktu tempuh secara keseluruhan rata-rata 1,5 jam dan relatif lebih aman khususnya pada musim hujan atau gelombang besar. Berikut ini disajikan data jumlah armada dan penumpang Klotok Dan Speed Boat di Tahun 2022:

Tabel 1. Data Armada Klotok dan Speed Boat Tahun 2022

No	Bulan	Speed Boat		Klotok	
		Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba
1	Januari	856	5690	580	480
2	Februari	921	813	431	421
3	Maret	1417	935	583	571
4	April	1330	1275	603	525
5	Mei	1940	1660	1328	1256
6	Juni	1464	1406	998	781
7	Juli	1304	1160	175	976
8	Agustus	1438	1376	84	747
9	September	1283	1141	94	879
10	Oktober	1306	1164	1028	923
11	November	1397	1254	941	838
12	Desember	2501	2371	1386	1178

Sumber: Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel 2. Data Penumpang Klotok dan Speed Boat Tahun 2022

No	Bulan	Speed Boat		Klotok	
		Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba
1	Januari	5992	5690	11600	9600
2	Februari	6453	6550	8620	8420
3	Maret	9920	8922	11660	11420
4	April	9315	8715	12060	10500
5	Mei	13580	11622	26560	25120
6	Juni	10245	9845	19600	15620
7	Juli	9125	8120	21500	19520
8	Agustus	10063	9630	16940	14940
9	September	8985	7985	18050	17580
10	Oktober	9146	8147	20560	18640
11	November	9772	8777	18820	16772
12	Desember	17508	16598	26729	23560

Sumber: Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan data tersebut, menjelaskan bahwa Tabel 1 Data Armada Klotok dan Speed Boat Tahun 2022 yang setiap bulannya mengalami peningkatan untuk jumlah armada speed boat sedangkan klotok, meskipun mengalami fluktuasi tiap bulannya namun klotok tetap menjadi salah satu armada transportasi laut yg juga digemari masyarakat untuk dipergunakan hal ini dapat dilihat di Tabel 2, Data Penumpang Klotok dan Speed Boat Tahun 2022, jumlah penumpang baik berangkat maupun yang tiba yg menggunakan moda transportasi klotok mengalami peningkatan sampai di bulan penumpang yang berangkat mencapai 26.729 dan yang tiba 23.560 penumpang, begitu pula dengan moda transportasi speed boat yang menjadi pilihan transportasi yang dipergunakan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui hasil wawancara di lokasi penelitian jumlah penumpang rata-rata perhari di Pelabuhan Speed Boat dan Klotok Penajam pada hari biasanya, kian mengalami peningkatan penumpang dan pada hari-hari besar bisa melonjak lima kali lipat dari hari biasa. Dengan meningkatnya pergerakan dalam masyarakat yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi laut khususnya speed boat dan klotok menjadi pilihan masyarakat karena belum adanya jembatan yang menghubungkan Penajam dengan Balikpapan maka dibutuhkan transportasi laut untuk mempermudah akses dari Penajam ke Balikpapan dan sebaliknya.

Perkembangan transportasi laut di Penajam yang tentunya sangat memegang peranan penting. Namun peran transportasi laut di Penajam masih banyaknya di temui permasalahan dan kekurangan atas moda transportasinya, khususnya pada moda transportasi Klotok dan Speed Penajam-Balikpapan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk dapat mengikuti permintaan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dari setiap faktor penentu kebijakan yang langsung atau tidak langsung kebijakannya berpengaruh terhadap kinerja sistem transportasi dan aksesibilitas moda transportasi yang ada khususnya, untuk moda transportasi transportasi Klotok dan Speed di Penajam Utara.

Dampak sosial pembangunan Kota Nusantara dan peningkatan infrastruktur transportasi di Penajam Paser Utara mencakup peningkatan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, memungkinkan akses lebih mudah ke berbagai wilayah, meningkatkan konektivitas, dan memperluas jangkauan ekonomi serta sosial. Selain itu, pertumbuhan ekonomi lokal didorong oleh peningkatan mobilitas, dengan kedatangan penduduk baru, pelaku usaha, dan pejabat pemerintahan menciptakan peluang baru dalam sektor ekonomi, seperti perdagangan, jasa, dan industri. Penataan ruang yang berkelanjutan, dengan memberikan 75% kawasan kota untuk ruang hijau, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat serta keseimbangan ekosistem.

Secara ekonomi, dampak mencakup peningkatan kegiatan ekonomi melalui infrastruktur transportasi yang memadai, mendukung pertumbuhan sektor ekonomi, terutama perdagangan dan pariwisata. Kota Balikpapan dan sekitarnya, sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian IKN, dapat menarik investasi, meningkatkan daya tarik bisnis, menciptakan peluang pekerjaan, dan mendorong investasi infrastruktur. Dampak sektor transportasi juga terlihat dalam peningkatan bisnis di sektor transportasi laut, seperti speed boat dan kapal klotok, dengan kebutuhan akan layanan yang handal memacu pertumbuhan bisnis.

Namun, tantangan yang dihadapi termasuk pengelolaan ruang dan lingkungan dengan pemeliharaan kawasan hijau, manajemen pertumbuhan penduduk, dan implementasi langkah-langkah keselamatan dan keamanan transportasi laut. Pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan juga menjadi tantangan, termasuk penggunaan lahan dan perlindungan terhadap lingkungan. Keseimbangan sosial-ekonomi harus dijaga melalui distribusi merata dari keuntungan ekonomi dan penyediaan akses pendidikan serta layanan kesehatan yang merata. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kompleksitas dampak dan tantangan yang dihadapi oleh Penajam Paser Utara seiring dengan perkembangan Kota Nusantara dan pertumbuhan infrastruktur transportasi.

Weimer & Vining (1992:1) dalam (Meutia, 2017) merumuskan analisis kebijakan berorientasi pelanggan yang relevan dengan keputusan-keputusan publik dan didasarkan pada nilai-nilai sosial. Fokus dari analisis kebijakan adalah merumuskan berbagai alternatif dan memilih salah satu di antaranya untuk direkomendasikan sebagai suatu kebijakan yang akan ditetapkan. Keberadaan kebijakan publik memiliki fokus utama yakni pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgent dalam menata kepentingan yang lebih umum (Rodiyah, Choiriyah, & Sukmana, 2022). Namun kenyataannya, tidak semua kebijakan mengalami proses yang rasional seperti ini. Dalam kenyataannya, proses kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks karena dipengaruhi oleh tarik-menarik antara berbagai kepentingan dan berbagai aktor, dipengaruhi pula oleh latar belakang pengalaman implementasi kebijakan terkait atau kebijakan sebelumnya, di'arah'kan oleh berbagai 'suara' kelompok kepentingan, dan biasanya memasuki ranah politik kepentingan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki *outcomes* di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan (Handoyo, 2018). Menurut Tachjan dalam (Herdiana, 2018), bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.

Menurut (Isabela, 2022), kebijakan publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu Kebijakan Substantif, Kebijakan Prosedural, Kebijakan Distributif, Kebijakan Regulatori, Kebijakan Redistributif, Kebijakan Material, Kebijakan Simbolis, Kebijakan yang Berhubungan dengan Barang Umum atau *Public Goods*, dan Kebijakan Barang Privat.

Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah aktivitas menciptakan pengetahuan dan proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan, meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Secara sederhana

analisis kebijakan adalah untuk merumuskan masalah sebagai pencarian solusi (Arsyad, 2020). Analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.

Manurut (Nurani, 2009) dan (Akib, 2020), analisis kebijakan publik menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel, yakni : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur birokrasi. Menurut (Mustari, 2015), ada empat elemen utama dalam kebijakan public, keempat elemen utama inilah yang menjadi dasar yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan. Adapun keempat elemen utama tersebut yaitu Input, Tujuan, Perangkat, dan Dampak.

Moda Transportasi

Pada dasarnya jenis moda transportasi secara umum terbagi menjadi tiga, diantaranya transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Namun yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai moda transportasi laut. Moda transportasi laut merupakan pilihan untuk mengangkut penumpang ataupun barang dalam jumlah besar, kecepatan, dan biaya angkutan per ton mil, relatif rendah, dan sangat menguntungkan untuk proses pengangkutan barang maupun penumpang dalam jarak tempuh yang jauh terkhususnya pada wilayah kepulauan. Untuk daerah yang secara ekonomis tidak mempunyai potensi atau daerah yang belum berkembang, namun membutuhkan pelayanan transportasi, maka pelayanan transportasi berfungsi untuk membantu perkembangan ekonomi daerah tersebut (Fabiana, 2019).

Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan perusahaan angkutan laut yang menyebutkan bahwa Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang atau hewan dalam suatu perjalanan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

Speed dan Klotok Penajam Utara

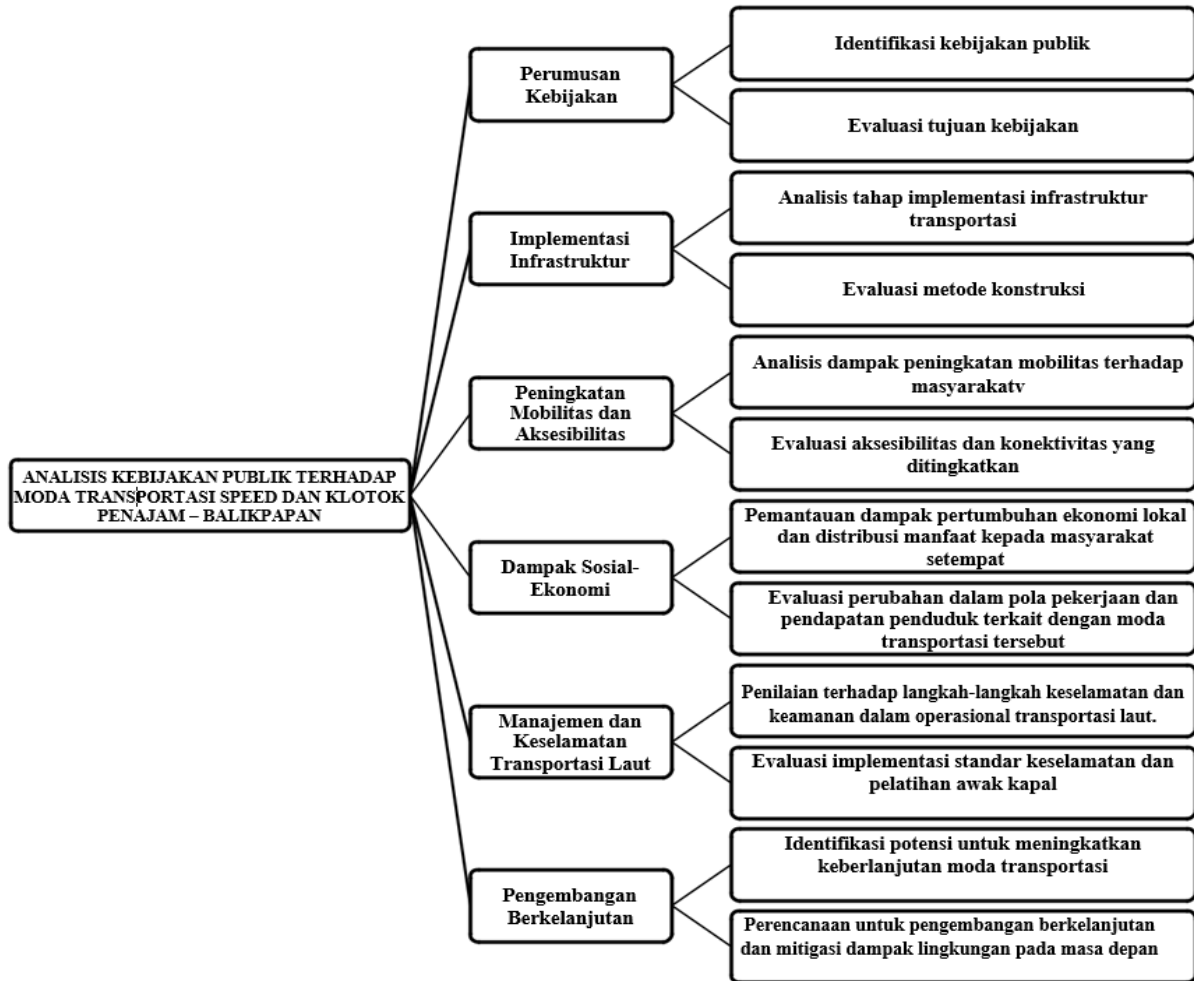
Kapal Klotok adalah kapal kecil yang terbuat dari kayu dan digerakan oleh mesin diesel. Selain mengangkut penumpang dan barang, klotok juga sanggup membawa kendaraan roda dua. Karena dapat membawa kendaraan roda dua itulah klotok menjadi salah satu alternatif transportasi bagi warga Balikpapan yang menyeberang ke Penajam dengan kendaraan dan tidak memakan waktu yang lama (Maslina dan Fauzan, 2016). Kapal klotok atau kapal kayu ini merupakan salah satu transportasi alternatif bagi masyarakat yang ingin berpergian ke Balikpapan maupun Penajam (Samir, 2019). Dengan menggunakan kapal klotok waktu tempuh sekitar 20 sampai 45 menit melalui Pelabuhan Kampung Baru dan Pelabuhan Penajam. Untuk biaya, untuk penumpang setiap orang dikenakan biaya Rp 10 ribu sementara untuk sepeda motor Rp 35 ribu. Selama ini, warga banyak memilih untuk naik kapal klotok karena selain murah juga aman dan langsung di pelabuhan Kampung Baru Balikpapan.

Naik speed bagi sebagian masyarakat juga menjadi alternatif apalagi yang ingin cepat sampai di Balikpapan maupun Penajam. Melalui pelabuhan speed boat Penajam dan Kampung Baru, Balikpapan, waktu tempuh untuk speed boat ini tak cukup lama hanya sekitar 30 menit. Namun untuk biaya, bervariasi karena bila melalui tiket harga sekitar Rp 15 ribu namun bila langsung sekitar Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu. Beda lagi bila dicarter bisa mencapai Rp 100 ribu lebih. Berikut adalah gambar speed.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan interaksi kompleks antara kebijakan publik, implementasi infrastruktur, operasional moda transportasi, dan dampaknya pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui pendekatan siklus hijau, analisis kebijakan dapat lebih komprehensif dan terfokus pada keberlanjutan dalam pengembangan moda transportasi

tersebut. Penelitian ini bertujuan ingin mengkaji bagaimana bentuk kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan moda transportasi speed dan klotok Penajam–Balikpapan. Oleh sebab itu, kerangka konsep yang digunakan, digambarkan seperti pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah penelitian terhadap suatu proses, peristiwa, atau perkembangan dimana bahan-bahan atau data yang dikumpulkan berupa keterangan-keterangan kualitatif yang hasil penelitiannya tidak untuk dijadikan sebagai generalisasi sebagaimana penelitian kuantitatif (Rusdi, 2007).

Lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Informan tersebut seperti pemerintah setempat atau pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan masyarakat setempat. Sedangkan sumber data pendukungnya adalah dokumen pendukung terkait penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait judul penelitian yang dikaji.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Studi Dokumentasi, Wawancara, dan Observasi. Tahap-tahap analisis menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Adapun hasil wawancara Bersama dengan informan terkait kebijakan publik terhadap moda transportasi speed dan klotok di Penajam-Balikpapan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut di Penajam–Balikpapan, diuraikan sebagai berikut:

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Andy Sunra Satriadi Sumaryo sebagai sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam-Balikpapan:

“Dari hasil wawancara, kebijakan publik terhadap moda transportasi di Penajam-Balikpapan mencakup regulasi dan izin operasional diatur oleh sub bidang angkutan perairan. Infrastruktur moda transportasi speed dianggap memadai, dengan optimisme perbaikan dari pemerintah. Fasilitas pelabuhan untuk klotok dinilai memadai, namun, inisiatif untuk meningkatkannya telah dimulai. Keamanan dan keselamatan mendapat dukungan, meskipun tidak ada aturan kecepatan spesifik. Pengelolaan lingkungan moda transportasi klotok ditangani oleh dinas perhubungan, tetapi belum ada inisiatif terukur untuk efisiensi bahan bakar atau mengurangi dampak lingkungan moda transportasi speed. Koordinasi antar pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, inisiatif kolaboratif, pemanfaatan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan masih memerlukan klarifikasi untuk gambaran yang lebih lengkap”

Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut:

“Berdasarkan hasil wawancara, langkah-langkah pemerintah daerah di Penajam-Balikpapan untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut melibatkan perhatian terhadap kejelasan persyaratan dan regulasi moda transportasi. Dukungan terus diberikan pada Upaya perbaikan infrastruktur moda transportasi speed dan fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok. Langkah-langkah lain mencakup penetapan aturan kecepatan spesifik, inisiatif konkret untuk efisiensi bahan bakar dan pengurangan dampak lingkungan moda transportasi speed. Diperlukan pula langkah-langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, mendorong inisiatif kolaboratif, memanfaatkan teknologi terbaru, serta merencanakan pengembangan masa depan yang berkelanjutan”

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kahar Mashud sebagai sebagai Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam-Balikpapan:

“Speed dan Klotok di Penajam-Balikpapan: Regulasi dan izin operasional moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan diatur oleh Dinas Perhubungan, mengikuti peraturan Kementerian Perhubungan. Meskipun operator harus mematuhi persyaratan khusus, infrastruktur moda transportasi speed masih perlu pemetaan lebih lanjut, dan fasilitas pelabuhan atau dermaga klotok masih dalam tahap pemantapan. Dalam aspek keamanan dan keselamatan, pemerintah daerah memberikan sosialisasi keselamatan, tanpa aturan kecepatan tertentu. Penanganan isu lingkungan melibatkan pengingat kepada operator, dan terdapat inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar”

Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut:

“Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan intensif dengan kolaborasi kearifan lokal, termasuk dalam prosedur pembelian bahan bakar. Penggunaan teknologi masih manual, dan rencana pengembangan masa depan dalam tahap pembahasan, dengan melihat peran moda transportasi sebagai peluang untuk peningkatan ekonomi dan sektor pariwisata daerah, memerlukan pendalaman tata ruang yang detail sebagai instrumen akses pintu masuk Kabupaten Penajam Paser Utara”

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Amiruddin sebagai sebagai THL Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam-Balikpapan:

"Saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan Sebagian besar pertanyaan terkait regulasi, infrastruktur, keamanan, lingkungan, koordinasi antara pemerintah lokal, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan. Saya tidak mengetahui izin operasional, persyaratan, kondisi infrastruktur, keamanan, aturan kecepatan, pengelolaan lingkungan, koordinasi pemerintah, penggunaan teknologi, atau rencana pengembangan di masa mendatang."

Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut:

"Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait aspek-aspek krusial dalam pengembangan moda transportasi di Kabupaten Penajam Paser Utara."

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan AJ Kuni sebagai sebagai Staff Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam-Balikpapan:

"Saya memiliki sejumlah keterbatasan informasi terkait regulasi, infrastruktur keamanan, pengelolaan lingkungan, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan. Saya tidak mengetahui secara detail mengenai izin operasional, persyaratan khusus, kondisi fasilitas, aturan keamanan, penanganan isu lingkungan, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan."

Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut:

"Meskipun terdapat inisiatif kolaboratif dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, informasi yang terbatas mengenai aspek-aspek kunci tersebut menunjukkan potensi ketidakjelasan dalam pengaturan dan pengembangan moda transportasi di w Kabupaten Penajam Paser Utara."

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Juliandra sebagai sebagai Staff Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam-Balikpapan:

"Dalam regulasi dan izin operasional, pemerintah setempat menangani izin operasional melalui dinas terkait dengan adanya persyaratan khusus seperti jam operasional klotok. Meskipun infrastruktur untuk moda transportasi speed memiliki rencana perbaikan, fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok dianggap tidak memadai. Keamanan dan keselamatan penumpang dan kru dijaga secara manual dan melalui himbauan kepada masyarakat, sementara aturan kecepatan untuk moda transportasi speed tidak ada. Pengelolaan lingkungan didukung dengan himbauan penggunaan alat safety, meskipun inisiatif untuk efisiensi bahan bakar tidak diketahui"

Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut:

"Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan terjadi melalui perda yang mengatur, dengan inisiatif kolaboratif terlihat pada kapal ferry yang menjamin keselamatan. Meskipun penggunaan teknologi belum diketahui, ada rencana perbaikan pelabuhan sebagai bagian dari pengembangan masa depan, sementara moda transportasi dianggap sangat menjanjikan untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah, tetapi masih perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah Penajam Paser Utara"

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Syaifullah Hasan sebagai sebagai Staff PPSDA/Honorer Kabupaten Penajam Paser Utara, Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam-Balikpapan:

“Moda transportasi di rute Penajam–Balikpapan diatur oleh regulasi dan izin operasional dari sub bidang angkutan perairan. Meskipun infrastruktur untuk moda transportasi speed dinilai cukup memadai, kurangnya informasi mengenai persyaratan khusus atau regulasi yang harus dipatuhi oleh operator menjadi ketidakpastian. Fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok dianggap memadai, dengan usaha untuk peningkatan. Keamanan dan keselamatan mendapat dukungan dari pemerintah setempat dengan menyediakan safety pelampung dan memberikan arahan sesuai standar keselamatan. Namun tidak ada aturan kecepatan spesifik yang harus diikuti. Pengelolaan lingkungan moda transportasi klotok ditangani langsung oleh dinas perhubungan, sementara inisiatif untuk efisiensi bahan bakar atau membatasi dampak lingkungan moda transportasi speed tidak diketahui. Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, inisiatif kolaboratif, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan jelas terkait aspek-aspek kunci pengelolaan moda transportasi di Kabupaten Penajam Paser Utara”

Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut:

“Langkah-langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut melibatkan klarifikasi lebih lanjut terkait regulasi dan persyaratan khusus moda transportasi. Selain itu, upaya peningkatan infrastruktur, keamanan, dan keselamatan moda transportasi speed dan klotok perlu ditingkatkan dengan memastikan adanya aturan kecepatan yang jelas. Inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan membatasi dampak lingkungan moda transportasi speed juga perlu diperhatikan. Koordinasi antar pemerintah daerah, penerapan teknologi, dan perencanaan pengembangan masa depan harus menjadi fokus untuk mengoptimalkan pelayanan transportasi laut di Kabupaten Penajam Paser Utara”

PEMBAHASAN

Analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan

Analisis kebijakan moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam–Balikpapan, berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2017, menekankan peran sentral Kepala Dinas Perhubungan dan koordinasi antar-seksi untuk keterpaduan kebijakan. Evaluasi pelaksanaan tugas dan optimalisasi kinerja sektor-sektor terkait menjadi fokus utama. Tantangan melibatkan regulasi, izin operasional, infrastruktur, keamanan, dan lingkungan, memerlukan koordinasi, penggunaan teknologi, dan perencanaan masa depan yang cermat. Dampak sosial-ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola pekerjaan, memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan wilayah, tetapi memerlukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 tahun 2017 yaitu, a) Pertama, peran sentral Kepala Dinas Perhubungan sebagai pemimpin, perumus kebijakan, dan pengelola program-program menyeluruh. Keterlibatan Kepala Seksi Angkutan Perairan, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, serta Kepala Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan penting untuk koordinasi dan implementasi kebijakan. b) Kedua, pentingnya koordinasi antar-seksi, seperti Angkutan Perairan, Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, dan Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan, untuk memastikan keterpaduan dan keserasian kebijakan terkait moda transportasi. c) Ketiga, fokus pada evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai kewajiban, penting untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap moda transportasi di daerah tersebut. d) Keempat, optimalisasi kinerja di sektor masing-masing, seperti Perencanaan dan Pembangunan Prasarana serta Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan, relevan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas moda transportasi yang digunakan.

Secara keseluruhan, regulasi ini memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak kebijakan publik terhadap sistem transportasi di Penajam – Balikpapan, dengan fokus pada pengelolaan kebijakan, koordinasi antar-seksi, evaluasi pelaksanaan, dan optimalisasi kinerja.

Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu, beberapa temuan sejalan dengan hasil penelitian tersebut. Sebagai contoh, penelitian oleh Nampira, Jainuri, & Yumitro (2022) yang membahas kebijakan pembangunan transportasi di daerah perbatasan memiliki persamaan dengan regulasi Penajam–Balikpapan, namun dengan fokus yang berbeda. Begitu pula, penelitian Kadarisman, Suharto, & Majid (2016) tentang formulasi kebijakan sistem transportasi laut sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam regulasi tersebut. Manurung (2019) menemukan pilar-pilar utama pengembangan transportasi laut, yang relevan dengan keberlanjutan moda transportasi.

Selanjutnya, penelitian Cahyandi (2020) mengenai peran transportasi laut dalam mendukung sirkulasi barang dan orang di suatu kecamatan memiliki persamaan dengan regulasi, meskipun berfokus pada konteks yang berbeda. Terakhir, penelitian Akhyary, Becti, Sinaga, & Buchori (2019) tentang analisis sumber daya dalam implementasi kebijakan transportasi laut memiliki keterkaitan dengan regulasi Penajam– Balikpapan, meskipun analisisnya lebih terfokus pada aspek sumber daya. Dengan demikian, temuan-temuan ini mendukung dan melengkapi gambaran keseluruhan terkait pengelolaan kebijakan publik terhadap moda transportasi di berbagai konteks penelitian.

Secara umum, hasil wawancara dengan para informan memberikan gambaran lengkap dan kompleks terkait dengan kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di rute Penajam–Balikpapan. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara tersebut yaitu:

- 1) Tantangan Regulasi dan Izin Operasional, Kendala terkait izin operasional, terutama terkait persyaratan teknis dan status kepemilikan lahan eksisting, menjadi hambatan utama yang memerlukan upaya ekstra untuk penyelesaiannya.
- 2) Infrastruktur dan Fasilitas, Wawancara mencerminkan kebutuhan pemetaan lebih lanjut terkait infrastruktur moda transportasi Speed, dengan alokasi anggaran revitalisasi Dermaga Speed dan Fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok masih memerlukan perbaikan agar memenuhi kriteria persyaratan teknis Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- 3) Keamanan dan Keselamatan, Monitoring keselamatan dan keamanan pelayaran masih belum maksimal, terutama karena status operasional pelabuhan yang belum jelas dan aturan kecepatan sudah ditetapkan, namun perlu peningkatan implementasi untuk memastikan keamanan.
- 4) Pengelolaan Lingkungan, Pengelolaan isu-isu lingkungan terkait moda transportasi klotok sulit dilakukan karena status pelabuhan yang belum jelas dan dampak emisi gas buang dianggap rendah, namun perlu pembenahan terutama dalam konteks pengarusutamaan lingkungan.
- 5) Koordinasi dan Kolaborasi, Koordinasi antara pemerintah lokal dan KSOP Balikpapan terbilang baik, tetapi belum ada inisiatif kolaboratif yang cukup untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perjalanan.
- 6) Penggunaan Teknologi, Masa depan moda transportasi memerlukan keterlibatan teknologi dan partisipasi swasta dengan izin operasional Badan Usaha Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- 7) Rencana Pengembangan Masa Depan, Rencana pengembangan melibatkan pelibatan swasta, terutama untuk mengelola Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Moda transportasi dianggap memiliki peran potensial dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata

daerah, terutama dengan adopsi konsep model Kapal Klotok.

- 8) Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat, Terdapat variasi dalam tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait aspek-aspek krusial dalam pengembangan moda transportasi, menunjukkan pentingnya edukasi dan informasi lebih lanjut.

Secara keseluruhan, wawancara menggambarkan kompleksitas dalam mengelola moda transportasi di wilayah tersebut, dengan tantangan yang melibatkan regulasi, infrastruktur, keamanan, lingkungan, koordinasi, teknologi, dan rencana pengembangan masa depan. Upaya terkoordinasi dari pemerintah dan pihak terkait diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan kondisi serta pemanfaatan moda transportasi di rute Penajam–Balikpapan.

Penelitian terdahulu juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman aspek-aspek kebijakan transportasi laut. Studi oleh Nampira, Jainuri, & Yumitro (2022) membahas kebijakan pembangunan transportasi di daerah perbatasan dengan fokus pada inovasi dan konektivitas. Sebaliknya, Kadarisman, Suharto, & Majid (2016) mengulas formulasi kebijakan sistem transportasi laut, dengan penekanan pada peningkatan peran armada pelayaran nasional. Manurung (2019) mengidentifikasi pilar-pilar utama pengembangan transportasi laut berdasarkan tren global dan industri maritim.

Dampak sosial-ekonomi dari moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan memiliki dimensi yang signifikan terhadap perkembangan wilayah tersebut. Dua aspek utama yang perlu diperhatikan dalam analisis ini melibatkan pemantauan dampak pertumbuhan ekonomi lokal dan evaluasi perubahan dalam pola pekerjaan serta pendapatan penduduk terkait dengan adopsi moda transportasi ini.

Peningkatan mobilitas masyarakat, didorong oleh efisiensi dan aksesibilitas moda transportasi speed dan klotok, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa moda transportasi ini mendorong kedatangan penduduk baru, pelaku usaha, dan pejabat pemerintahan ke daerah tersebut. Hal ini membuka peluang baru dalam sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan industri. Distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diperhatikan agar tidak terjadi disparitas di antara masyarakat setempat. Pemantauan yang berkelanjutan terhadap dampak pertumbuhan ekonomi, termasuk indikator seperti peningkatan lapangan kerja dan perkembangan sektor usaha lokal, dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kontribusi positif moda transportasi ini terhadap wilayah tersebut.

Aktivitas ekonomi yang meningkat dapat berdampak pada perubahan dalam pola pekerjaan masyarakat. Adopsi moda transportasi speed dan klotok dapat menciptakan peluang pekerjaan baru, baik langsung di sektor transportasi maupun tidak langsung di sektor-sektor terkait, seperti pariwisata dan layanan pendukung. Evaluasi terhadap perubahan dalam pola pekerjaan perlu mencakup pemahaman tentang jenis pekerjaan yang muncul, keterlibatan masyarakat setempat dalam sektor-sektor tersebut, dan dampaknya pada pendapatan penduduk. Dengan meningkatnya konektivitas, masyarakat setempat juga dapat terlibat lebih aktif dalam sektor pariwisata, membuka peluang untuk pendapatan tambahan.

Oleh karena itu, secara keseluruhan pemantauan secara berkelanjutan terhadap dampak sosial-ekonomi moda transportasi speed dan klotok sangat penting untuk memahami kontribusinya terhadap pembangunan wilayah. Pemahaman yang mendalam tentang perubahan ekonomi lokal, distribusi manfaat, perubahan dalam struktur pekerjaan, dan dampaknya pada pendapatan masyarakat dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan wilayah secara inklusif dan berkelanjutan.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut.

Dalam upaya mengembangkan Pelabuhan Klotok dan Speed di Penajam Paser Utara, pemerintah telah menunjukkan perhatian serius dengan mengalokasikan anggaran pembangunan yang substansial. Alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung proyek tersebut, memastikan bahwa pelabuhan ini dapat berkembang secara optimal. Perjanjian terkait hak atas lahan, yang sebelumnya telah disepakati antara pemerintah dan pemilik lahan (masyarakat), menjadi fondasi kerjasama. Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pemanfaatan pelabuhan, menciptakan dasar yang kokoh untuk pengelolaan bersama yang saling menguntungkan.

Anggaran pembangunan yang telah dialokasikan pemerintah tidak hanya mencakup infrastruktur Pelabuhan Speed dan Klotok, tetapi juga mendukung berbagai aspek proyek, seperti pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan. Tujuannya tidak hanya terbatas pada kecepatan operasional (speed), tetapi juga pada efisiensi dan keberlanjutan. Dalam perjanjian tersebut, terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing pihak. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan anggaran dan fasilitas yang diperlukan, sementara pemilik lahan diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan berkontribusi dalam pengelolaan pelabuhan.

Perjanjian atau kesepakatan, pemerintah dan masyarakat sebagai pemilik lahan menyampaikan komitmen antara kedua belah pihak untuk menjaga dan memajukan Pelabuhan Klotok dan Speed Penajam. Kesepakatan ini bukan hanya tentang pengembangan infrastruktur, tetapi juga tentang pembangunan berkelanjutan dan inklusif yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Harapannya, pelabuhan ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh komunitas.

Rencana visualisasi revitalisasi dermaga di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi sebuah komponen Langkah-langka strategis yang mendukung pemahaman dan implementasi kebijakan publik terkait moda transportasi laut di wilayah tersebut. Desain fisik dermaga yang ditingkatkan, penataan lahan dan akses yang lebih efisien, serta fasilitas pendukung yang meningkatkan kenyamanan, semuanya berkontribusi pada peningkatan pelayanan transportasi laut. Aspek keamanan dan keselamatan yang diintegrasikan dalam rencana visualisasi mencerminkan komitmen terhadap keselamatan pengguna, sejalan dengan upaya Dinas Perhubungan. Strategi peningkatan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan landasan keuangan yang solid untuk mendukung keberlanjutan operasional dermaga. Partisipasi masyarakat lokal dan perubahan tata ruang menggambarkan inklusivitas kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi lokal.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Nampira, Jainuri, & Yumitro (2022) mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Transportasi di Daerah Perbatasan menyoroti perlunya inovasi dalam memperoleh dana dari pihak swasta, sebuah tema yang relevan dengan strategi keuangan dalam rencana dermaga di Penajam. Meskipun fokus dan lokasi penelitian berbeda, persamaan dalam pendekatan kualitatif dan pembahasan mengenai kebijakan transportasi laut dapat diidentifikasi.

Demikian pula, penelitian Kadarisman, Suharto, & Majid (2016) tentang Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut menunjukkan persamaan dalam pembahasan kebijakan transportasi laut, meskipun konteksnya berbeda dengan Penajam. Begitu juga dengan penelitian lainnya, seperti Manurung (2019) yang membahas Kebijakan dan Strategi Pengembangan Transportasi Laut di Indonesia dengan fokus pada studi kasus dan analisis literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Paramita (2024) dan Kadarisman et al. (2016), sejumlah rekomendasi dapat diajukan untuk memberikan panduan terhadap langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pemerintah daerah, contohnya Pemerintah Daerah Balikpapan, guna meningkatkan pelayanan transportasi laut.

Rekomendasi berdasarkan Penelitian Paramita (2024) menyoroti pentingnya memperhatikan berbagai aspek pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) dalam penyediaan layanan transportasi. Disarankan agar pemerintah daerah tidak hanya memfokuskan perhatian pada aspek ekonomi PSO, tetapi juga mempertimbangkan tujuan lainnya, seperti memberikan transportasi yang terjangkau kepada penduduk berpenghasilan rendah. Selain itu, perlu diupayakan keselarasan dalam penerapan teknologi PSO guna meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan layanan transportasi di Indonesia.

Kadarisman et al. (2016) memberikan panduan khusus terkait transportasi laut. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerapan azas cabotage sebagai langkah meningkatkan peran armada pelayaran nasional, baik dalam angkutan barang dalam negeri maupun ekspor-impor. Langkah-langkah lain termasuk mendorong peningkatan koordinasi di pelabuhan guna mengurangi pungutan tidak resmi, memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan implementasi standar internasional seperti International Ship and Port Security, serta merestrukturisasi peraturan perundangan dan kelembagaan di subsektor transportasi laut. Pentingnya investasi dalam infrastruktur terkait transportasi laut juga diangkat sebagai rekomendasi. Pemerintah daerah dapat berinvestasi dalam pengembangan pelabuhan dan jalur pelayaran meningkatkan kelancaran arus barang dan manusia di daerah tersebut.

Penelitian oleh Cahyandi (2020) tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Eksistensi Transportasi Laut di Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap membahas peran transportasi laut dalam mendukung arus barang dan orang, meskipun dengan konteks yang berbeda. Analogi ini dapat ditemukan dalam rencana dermaga di Penajam, yang juga berupaya meningkatkan moda transportasi laut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang disampaikan, maka kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut:

Analisis kebijakan moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam– Balikpapan: Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2017, menekankan peran sentral Kepala Dinas Perhubungan dan koordinasi antar-seksi untuk keterpaduan kebijakan. Fokus utama mencakup evaluasi pelaksanaan tugas dan optimalisasi kinerja sektor-sektor terkait. Tantangan melibatkan regulasi, izin operasional, infrastruktur, keamanan, dan lingkungan, memerlukan koordinasi, penggunaan teknologi, dan perencanaan masa depan yang cermat. Hasil wawancara menggambarkan tantangan terkait regulasi dan izin operasional, infrastruktur, keamanan, lingkungan, koordinasi, teknologi, dan rencana pengembangan. Dampak sosial-ekonomi moda transportasi ini memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan wilayah, namun memerlukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan.

Pemerintah Penajam Paser Utara juga menegaskan komitmennya dalam pengembangan Pelabuhan Klotok dan Speed dengan mengalokasikan anggaran pembangunan substansial. Kesepakatan hak atas lahan menjadi dasar kerjasama antara pemerintah dan pemilik lahan, menciptakan fondasi kuat untuk pengelolaan bersama. Alokasi anggaran tidak hanya untuk infrastruktur Pelabuhan Speed dan Klotok, tetapi juga untuk fasilitas dan peningkatan layanan dengan fokus pada efisiensi dan keberlanjutan. Perjanjian menetapkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, di mana pemerintah menyediakan anggaran dan fasilitas, sementara pemilik lahan berkontribusi dan mematuhi peraturan. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga dan memajukan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait.

Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut dengan merencanakan revitalisasi dermaga. Rencana tersebut mencakup desain fisik dermaga yang ditingkatkan, penataan lahan, dan akses yang lebih efisien, serta fasilitas pendukung untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Aspek keamanan dan keselamatan diintegrasikan dalam rencana visualisasi, sejalan dengan komitmen Dinas Perhubungan. Langkah ini juga melibatkan strategi peningkatan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai landasan keuangan yang solid. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan perubahan tata ruang, langkah-langkah ini mencerminkan inklusivitas kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyary, E., Bekti, H., Sinaga, O., & Buchori, A. (2019). Analisis Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Transportasi Laut Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 7 No. 1.
- Akib, H. (2020). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 1.
- Cahyandi, K. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Eksistensi Transportasi Laut Guna Meningkatkan Kelancaran Sirkulasi Barang dan Orang di Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap. *Wijayakusuma Prosiding Seminar Nasional*. Vol. 1 No. 1.
- Handoyo, E. (2018). *Kebijakan Publik*. In *Mustrose*. Semarang: Widya Karya.
- Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. Vol. 1 No. 3.
- Kadarisman, M., Suharto, Y., & Majid, A. (2016). Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut Policy Formulation of Sea Transportation System. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*. Vol. 3 No. 2.
- Manurung, M. (2019). *Kebijakan dan Strategi pengembangan Transportasi Laut di Indonesia*. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Kepelabuhan.
- Maslina dan Fauzan, M. (2016). Analisa Biaya Operasional Kapal Kotok Terhadap Keselamatan Transportasi Air Pada Pelabuhan Penyeberangan Balikpapan- Penajam. *Transukma*. Vol. 2 No. 1.
- Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. Edition 3, Terjemah Tjetjep Rohidin Rohidi, UI-Press*. USA: Sage Publication.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Nurani, D. (2009). Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional (BOS) di SDN Jakarta Selatan. *Thesis*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 20 tahun 2015. (2015). Standar Keselamatan Pelayaran.
- Paramita, R. (2024). Reviewing the Implementation of Public Service Obligation Policies in the Transportation Sector. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*. Vol. 8 No. 1.
- Ramdhani, A., & Randhani, M, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Vol. 11 No. 1.
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. *Umsid Press*.
- Rusdi, P. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Rijal Institute